

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Proses Sejarah Terbentuknya PAN

Kelahiran PAN tidak dapat dilepaskan dari sosok Amien Rais. Sebelum menjabat Ketua Umum PAN, Amien Rais adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah yang merupakan organisasi sosial keagamaan (Islam). Amien dijuluki sebagai tokoh reformasi karena menjelang Soeharto lengser, ia aktif bersama-sama dengan mahasiswa melahirkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan reformasi. Ia juga pernah menjadi anggota ICMI, tetapi kemudian keluar dari dewan pakar ICMI.

Jauh sebelum ia mencalonkan sebagai capres pada Sidang Umum MPR 1998, Amien Rais mengeluarkan ide suksesi nasional. Pada SU MPR 1998 peluang Amien Rais sangat kecil dan secara akal tidak mungkin sama sekali karena kondisi politik yang begitu kuat berpusat pada Presiden Soeharto dengan Golkar sebagai partainya pemerintah. Orang yang berada di luar struktur pemerintahan sangat sulit menjadi presiden. Pencalonan Amien Rais pada Sidang Umum MPR 1998 merupakan proses edukasi bagi bangsa Indonesia (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:21).

Sekarang zaman reformasi telah datang. Maka Amien Rais lebih berani lagi mencalonkan diri sebagai presiden melalui partainya, yaitu Partai Amanat Nasional. Ia sejak awal sudah memproklamasikan diri sebagai capres.

PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Deklarasi partai ini dilakukan di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri sekitar 15 ribu massa (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:137). Amien meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Pusat Muhammadiyah karena sekarang ia terjun ke dunia politik praktis. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. Amien Rais digantikan oleh Prof. Dr. A. Syafii Maarif. Ia adalah Guru Besar di IKIP Yogyakarta. Amien Rais sendiri adalah dosen ilmu politik di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Setelah Soeharto lengser, Amien Rais dikukuhkan menjadi Guru Besar.

Sebelum mendeklarasikan partainya, Amien Rais sempat akan beraliansi dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra membentuk Partai Bulan Bintang, tetapi ada perbedaan yang prinsip antara partai ini dengan Amien Rais. PBB menginginkan partainya berazas Islam, tetapi Amien Rais menginginkan partai ini bersifat terbuka karena Amien sadar bahwa pintu reformasi tidak hanya didukung oleh ummat Islam saja (Sutipyo R dan Asmawi, 1999:123).

Setelah melewati tahap tersebut, Amien Rais berkeinginan mendirikan partai yang bersifat majemuk dan rencananya diberi nama Partai Amanat Bangsa (Sutipyo dan Asmawi, 1999:128). Partai ini nantinya akan didukung oleh teman-teman Amien yang berada dalam MARA (Majelis Amanat Rakyat), Kelompok Tiber Timur (Tertira) 57, PPSK (Pusat Pengkajian dan Strategi Kebijakan), serta tak ketinggalan LSM dan tokoh-tokoh intelektual. Deklarasi partai ini diperkirakan tanggal 17 Agustus 1998. Lalu Amien mengadakan pertemuan pada tanggal 5-6 Agustus 1998 di Mega Mendung, Bogor, yang dihadiri: dari PPSK Yogyakarta diwakili Samsurizal Pangabean dan Mochtar Mas'ood, kelompok

Tertira diwakili oleh M. Dawam Rahardjo dan Amin Azis, Muhammadiyah diwakili A.M. Fatwa, MARA diwakili Goenawan Muhammad, Faisal Basri, dan Albert Hasibuan, Gema Madani diwakili oleh Ismid Hadad, PPP diwakili oleh Aisyah Amini, Yusuf Syakir, dan Moedrick Sangidoe.

Pertemuan tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan platform partai dan nama partai yang semula Partai Amanat Bangsa diubah menjadi Partai Amanat Nasional. Platform PAN secara sederhana terangkum dalam tiga kata kunci : kemajemukan, demokrasi, dan keadilan (Sutipyo R dan Asmawi, 1999:133). Cita-cita PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Dan jika PAN tidak berada dalam posisi pemerintah, PAN nantinya akan menjadi oposisi dari pemerintah.

Karena PAN bersifat terbuka, anggotanya pun banyak dari kalangan nonmuslim seperti: Shindunata (alias Ong Tjong Hay), Dr. Albert Hasibuan, Dr. Christianto Wibisono, Th. Sumartana (Direktur DIAN). Ada juga beberapa pengurus Muhammadiyah yang tidak setuju dengan azas yang dianut oleh PAN, yaitu Drs. Adaby Darban dan putra AR Fachrudin (mantan Ketua Muhammadiyah), Fauzi AR (Sutipyo dan Asmawi, 1999:152). Adaby Darban memilih Partai Keadilan, sedangkan Fauzi AR memilih Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai ini memang secara jelas mencatumkan Islam sebagai azas partainya.

Orang-orang PAN di tingkat nasional kebanyakan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sebagian besar dari mereka adalah intelektual kampus dari perguruan tinggi terkemuka seperti UI dan UGM. Mereka memang ahli di

bidangnya, tetapi miskin dalam pengalaman politik (Sutipyo dan Asmawi, 1999:153). Mereka tidak memiliki basis massa yang kuat dan hanya mempunyai basis massa di perkotaan, serta dalam ruang lingkup yang terbatas sehingga banyak yang meragukan perolehan suara PAN dalam pemilu kali ini. Walaupun PAN terkenal itu tidak dapat dilepaskan dari ketokohan Amien Rais dalam memperjuangkan reformasi.

2.2 PAN dan Partai-Partai yang lain

PAN merupakan partai yang menganut azas keterbukaan. Ia didirikan setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. PAN diramalkan masuk dalam tiga besar bersama PKB dan PDI Perjuangan. Selain itu ada beberapa partai yang berazaskan Islam seperti Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Ummat, dan masih banyak partai-partai kecil lainnya yang lebih populer disebut partai gurem yang berazaskan Islam.

Pendukung PAN banyak berasal dari warga Muhammadiyah, sedangkan pendukung PKB berasal dari warga Nahdatul Ulama. Amien Rais lain dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur adalah deklarator PKB. Dia tidak masuk dalam struktur kepengurusan PKB. Ketua PKB dipegang oleh Drs. Matori Abdul Jalil. Antara PKB dan PAN memiliki basis massa yang berbeda. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang menginginkan ummatnya menjadi ummat yang modern, sedangkan Nahdatul Ulama lebih berbasis pada wilayah pesantren yang ada di pedesaan. Pada waktu zaman Soekarno, partai politik yang berazaskan Islam adalah Masyumi. Diantara pendukung partai ini

adalah Muhammadiyah dan NU. Pada tahun 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi dan kemudian merubah dirinya menjadi partai politik NU. Hal ini karena dalam kepengurusan Masyumi, Dewan Eksekutif seluruhnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin modernis, atau “orang-orang sekolahan” (Syafii Maarif, 1996:117). Pada pihak orang-orang NU, selalu memegang jabatan di Dewan Partai yang mengurus masalah-masalah agama dalam arti sempit, yaitu yang bertalian dengan isu-isu hukum agama, tentu saja Masyumi kehilangan sebagian suaranya. Padahal NU adalah suatu gerakan agama tradisional dengan beratus-ratus kyainya yang menyokong Masyumi, terutama dari daerah pedesaan. Sebagai partai politik yang berdiri sendiri pada Pemilu tahun 1955, NU muncul sebagai pemenang nomor tiga setelah PNI dan Masyumi (Syafii Maarif, 1996:117).

Sampai sekarang pun, yang kemudian terwujud dalam PAN dan PKB kedua partai ini sulit mengadakan koalisi. Antara Amien Rais dan Gus Dur sering terjadi ketidakseragaman pendapat. Pada waktu Gus Dur berkunjung ke kediaman mantan presiden Soeharto, Amien Rais tidak sependapat dengan langkah Gus Dur ini. Penyelesaian soal mantan presiden hendaknya diselesaikan secara transparan. Dan ada yang menduga, Soeharto masih berkuasa dibalik layar. Dari sinilah muncul istilah Soehartoisme.

PAN dan PDI-P sama-sama mempunyai kesamaan, yaitu ketuanya merupakan orang yang tidak disenangi oleh pemerintahan Soeharto. PDI-P merupakan partai yang nasionalis. Pada zaman reformasi, PDI-P dengan ketuanya Megawati Soekarnoputri, mempunyai kesempatan untuk meraih suara pada Pemilu bulan Juni 1999. Salah satu perbedaan antara PDI-P dengan PAN adalah

masalah Timor-Timur. Dalam platformnya, PAN lebih setuju ke arah referendum, sedangkan PDI-P lebih menyukai Timor-Timur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pribadi Megawati juga sangat kontras dengan Amien Rais. Amien Rais yang bergelar profesor sangat aktif mengikuti dan menganalisis masalah-masalah yang sedang terjadi baik skala nasional maupun internasional. Megawati banyak dikritik karena terlalu pendiam menghadapi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Ketidakcocokan membuat partai ini sulit berkoalisi.

PAN dan Partai Golkar (baru) juga sulit berkoalisi. Golkar adalah partai yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi *single majority*. Kemudian setelah reformasi, Ir. Akbar Tanjung terpilih menjadi orang nomor satu pada partai pohon beringin ini. Akbar Tanjung adalah mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam. Seperti diketahui, HMI adalah organisasi mahasiswa yang sebagian besar anggotanya dari warga Muhammadiyah. Amien Rais dahulu adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Jadi, apakah PAN akan berkoalisi dengan Golkar Baru, masih sulit juga memprediksi walaupun Akbar Tanjung pernah aktif di kepengurusan HMI. Di tubuh Golkar, ada kelompok Edi Sudrajat dan Try Sutrisno yang kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan. Hal ini karena kelompok Edi Sudrajat kalah bersaing dengan kelompok Akbar Tanjung yang memenangkan pemilihan Ketua Umum Pusat Golongan Karya. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru, sehingga partai ini menyebut dirinya sebagai Golkar Baru.

Pada saat awal gerakan reformasi, Amien Rais sudah rajin berkeliling daerah. Ia membeberkan alasan tentang keharusan suksesi. Kemampuan retorikanya cukup bagus. Pada saat yang sama Amien juga membangkitkan kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari ketakutan massal, dan memahami isu suksesi secara wajar (Purwo Sumitro, 1998:94). Setelah PAN resmi terbentuk, Amien Rais secara resmi dicalonkan sebagai presiden keempat Republik Indonesia. Amien Rais bertumpu pada dukungan utama PAN ditambah kemungkinan koalisi atau dukungan massa dengan Partai Persatuan Pembangunan, Muhammadiyah, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, dan partai-partai Islam yang lain (Purwo Sumitro, 1998:95). Selain itu juga dari basis intelektual kampus, kelas menengah perkotaan, dan pengusaha etnis Cina. Sementara itu, Megawati yang juga mencalonkan diri sebagai presiden bertumpu pada dukungan utama PDI Perjuangan, ditambah kemungkinan koalisi massa dengan PKB, NU, Barisan Nasional, dan kelompok Sarwono Jusumaatmaja cs (Purwo Sumitro, 1998:95). Juga dari basis simpatisan dari purnawirawan, dan kelompok pengusaha nasionalis.

Sumbangan Amien pada saat munculnya gerakan reformasi jauh lebih konkret dibanding dengan Megawati (Purwo Sumitro, 1998:94). Megawati terkesan diam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Beberapa kalangan juga menyayangkan sikap lamban Megawati ini. Sedangkan simpati pada perjuangan Amien Rais sudah terlihat jauh sebelum gema gerakan reformasi. Sikapnya yang kritis dan vokal pada ketimpangan sosial politik di tanah air dinilai banyak kalangan cukup rasional dan objektif.

2.3 Deklarasi Ciganjur

Menjelang Sidang Istimewa MPR yang dilaksanakan 10-13 November 1998, suasana politik kembali diwarnai pro dan kontra Sidang Istimewa. Kekhawatiran munculnya Soehartoisme cukup beralasan karena DPR/MPR masih merupakan produk lama semasa Presiden Soeharto masih menjabat. Kelompok anti Habibie yang dimotori Aksi Rakyat Bersatu, Forum Kota, Koalisi Nasional yang dikoordinasi Ratna Sarumpaet, Barisan Nasional yang dikomandani Letjen TNI (Purn) Kemal Idris berjanji menumpahkan massa ke Senayan untuk menolak Sidang Istimewa (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:75).

Kelompok yang pro Sidang Istimewa dan pro Habibie mengerahkan beribu-ribu massa sipil dengan senjata tradisional. Melihat kondisi tersebut, ada ide untuk mempertemukan tokoh-tokoh yang dinilai memiliki basis massa yang jelas dan mempunyai komitmen reformasi. Mereka itu adalah Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono X. Ide ini kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengatasnamakan FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta). Mereka mendatangi rumah Gus Dur dan Megawati. Bahkan mereka akan mendirikan kemah kalau ide mereka tidak didengar. Amien Rais setelah dihubungi menyatakan kesanggupannya. Akhirnya ide ini terlaksana pada tanggal 10 November 1999 di rumah Gus Dur di kawasan Ciganjur. Para mahasiswa menyodorkan draft yang akan dibahas oleh empat tokoh tersebut. Ada empat agenda utama, yaitu disintegrasi bangsa, dwifungsi ABRI, pemerintahan Habibie, dan masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pertemuan tersebut

berlangsung santai, tetapi serius. Setelah pertemuan berlangsung, mereka berempat membuat sebuah deklarasi yang terkenal dengan “Deklarasi Ciganjur”. Ada 8 hal yang menjadi perhatian para tokoh tersebut. Tetapi yang paling penting, mereka berharap para wakil rakyat yang sedang bersidang di Senayan mendengarkan aspirasi rakyat yang menghendaki reformasi di segala bidang. Diantara 8 hal tersebut adalah penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap paling lama 6 tahun dari deklarasi ini, pengusutan pejabat-pejabat yang korupsi, termasuk mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan pemilu secepatnya untuk mengakhiri pemerintahan transisi Presiden Habibie, mendesak seluruh Pengamanan Swakarsa dalam Sidang Istimewa untuk kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan.

Deklarasi Ciganjur ditanggapi oleh berbagai kalangan masyarakat dan pengamat sebagai pertemuan yang positif. Prof. Dr. Ichlasul Amal, Rektor UGM Yogyakarta, berpendapat bahwa pertemuan tersebut perlu diperluas dengan mengajak semua partai politik calon peserta Pemilu 1999 (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:95). Hal ini ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu nanti agar berjalan secara *fair* dan berkualitas. Dr. Rizal Ramli (Direktur Econit) mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini mirip dengan peristiwa politik Rengasdengklok pada tahun 1945 yang “menculik” Soekarno-Hatta (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:96).

Deklarasi Ciganjur merupakan usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh yang selama ini berjuang untuk reformasi, tetapi terkadang memiliki pendapat yang berbeda. Para mahasiswa yang kemudian mempertemukan tokoh-tokoh

tersebut. Mahasiswa adalah kekuatan intelektual yang jauh dari ambisi-ambisi politik tertentu. Amien Rais yang merupakan tokoh reformasi dan Ketua Umum Pusat PAN mempunyai andil dalam pertemuan tersebut.

Amien Rais pernah mengeluarkan ide negara federasi. Amien melontarkan ide ini karena melihat nasib daerah-daerah yang kondisi ekonominya memprihatinkan. Daerah-daerah ini sebetulnya merupakan penghasil tambang yang besar seperti Aceh dan Irian Jaya. Tetapi akibat sistem pembagian yang tidak seimbang, dan akibat sistem yang sentralistik dengan berpusat di Jakarta, maka yang menikmati bukan penduduk setempat, tetapi penduduk Jakarta bahkan luar negeri. Pada saat membahas soal ini sempat terjadi kekhawatiran terjadi pembahasan yang alot karena PDI maupun PKB tidak setuju dengan bentuk negara federasi. Kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Amien Rais mengamini bahwa bentuk negara persatuan sebagai suatu yang final (Sutipyo R. dan Asmawi, 1999:87). Untuk sementara masyarakat dibuat sedikit lega dengan bertemunya tokoh-tokoh di atas. Ada kekhawatiran, para elite politik tidak lagi memikirkan keadaan rakyat yang sedang mengalami krisis ekonomi. Mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing.

2.4 Kampanye PAN di Surabaya

Masa kampanye secara resmi dimulai dari tanggal 19 Mei sampai dengan 4 Juni 1999. Waktu yang tersedia adalah 16 hari. Khusus untuk hari Waisak, kampanye diliburkan. Sebelum masa itu sebenarnya telah terjadi kegiatan prakampanye yang berupa berbagai macam kegiatan yang dilakukan partai untuk

menarik calon pemilihnya. Kegiatan itu misalnya: deklarasi partai, arak-arakan atau pawai, tabligh akbar, temu kader, pidato politik, seminar.

PAN juga memanfaatkan masa prakampanye seperti itu. Kaos yang dipakai oleh pendukung PAN didominasi oleh warna putih dan biru. Warna tersebut sesuai dengan lambang partai, yaitu matahari yang berwarna putih dengan warna dasarnya biru. Ketika ada suatu acara partai, misalnya deklarasi partai, pendukung PAN ini mengadakan pawai dengan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat menuju ke tempat deklarasi. Di sepanjang perjalanan, mereka mengibarkan atribut-atribut partai yang berupa kaos bergambar Amien Rais maupun dengan bendera-bendera PAN. Pendukung PAN dikenal masyarakat sebagai pendukung yang tertib dan simpati, tidak mengganggu pemakai jalan lain. Mungkin saja karena mereka dari golongan masyarakat kota dan terpelajar.

Salah satu acara prakampanye adalah pawai partai-partai dalam rangka pembukaan Obral Besar Surabaya (OBS)'99 tanggal 1 Mei 1999. Acara tersebut dimulai dari Taman Bungkul dan berakhir di Parkir Timur Plaza Surabaya. Acara ini dibuka oleh Walikota Surabaya, Sunarto Sumoprawiro. Dari rangkaian pawai yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, PAN adalah peserta pawai paling tertib dan terlihat menarik penampilannya (*Jawa Pos*, 2 Mei 1999, hal. 9). Mereka mengenakan pakaian ala ninja dengan tutup kepala bergambar lambang partai dan kaosnya ada tulisan "show of peace". Mereka mendapat aplaus simpati warga sepanjang jalan yang dilewati. Lain jika yang lewat adalah Partai Golkar ataupun PDI Budi Hardjono. Mereka disoraki warga dengan berteriak *huu* yang merupakan ekspresi mengejek partai tersebut.

Contoh lain masa prakampanye ini adalah deklarasi partai yang diisi pidato politik oleh pengurus PAN, terutama dari pusat. Contohnya adalah deklarasi Pengurus Anak Cabang PAN se-Surabaya oleh Amien Rais di Dupak pada tanggal 6 Februari 1999 dan deklarasi Pengurus Ranting oleh A.M. Fatwa di kebun Bibit Bratang pada tanggal 25 April 1999. Seperti biasa, acara seperti itu selalu diikuti oleh pendukung PAN dengan antusias. Mereka datang ke tempat deklarasi secara bersama-sama dalam bentuk pawai. Tak jarang mereka berpapasan dengan pendukung partai yang lain, seperti PKB, PDI-P, dan PK. Ketika deklarasi di Dupak, Amien Rais memberikan penjelasan kondisi terakhir partai dan kondisi sosial politik yang berkembang. Tak ketinggalan pula satgas-satgas dari PDI-P dan Banser dari PKB ikut memberikan bantuan mengamankan keadaan di tempat deklarasi. Begitu juga waktu A.M. Fatwa akan memberikan pidato dan deklarasi Pengurus Ranting di Kebun Bibit. Panitia mempersilakan pendukung PAN menjemput Pengurus Pusat PAN ini dari bundaran tol Waru. Para pendukung PAN mengadakan pawai untuk menuju ke Kebun Bibit. Para undangan yang menghadiri acara seperti ini kebanyakan pendukung PAN sendiri. Ada juga masyarakat yang sekedar ingin mengetahui pidato A.M. Fatwa.

Masa kampanye resmi dimanfaatkan oleh PAN dengan menggelar kampanye monologis maupun dialogis. Kampanye monologis adalah kampanye yang di dalamnya tidak terjadi dialog antara juru kampanye dengan pendukungnya. Jurkam hanya berpidato menyampaikan ide-idenya melalui panggung kampanye. Kampanye dialogis adalah kampanye yang melibatkan peserta kampanye sebagai peserta diskusi terhadap program-program yang

ditawarkan oleh partai politik. Kampanye dialogis biasanya dilakukan di hotel-hotel ataupun gedung-gedung pertemuan. Kampanye monologis dilakukan di tempat-tempat yang lebih luas karena untuk menampung para pendukung PAN yang datang melihat ataupun mendengarkan pidato para juru kampanye PAN.

Kampanye kali ini tidak diperbolehkan lintas daerah tingkat II. Ketentuan ini berlaku untuk kampanye out door mulai pukul 06.00-18.00 WIB. Kampanye dialogis di dalam gedung tidak terikat oleh waktu dan kelompok (*Jawa Pos*, 13 Mei 1999, hal. 9). Ketentuan tersebut berasal dari penjelasan Kepala Biro Penyelenggara PPD (Panitia Pemilihan Daerah) I Jatim, Zainal Mubtadien S.H., MBA dalam rapat antara PPD I dan PPD II se-Jatim di Hotel Simpang Surabaya.

PPD I Jatim juga membuat pemisahan partai politik menjadi 4 kelompok besar. Menurut Ketua PPD I, Drs. H. Bisjrie Abdul Djalil, pemisahan ini bukan berdasarkan besar kecilnya partai, tetapi merupakan antisipasi terhadap partai yang rawan konflik (*Jawa Pos*, 13 Mei 1999, hal. 9). Contohnya adalah pemisahan antara PKB dengan tiga partai yang juga mempunyai basis massa warga NU, yaitu Partai Nahdatul Ummah, Partai Kebangkitan Ummat, dan Partai Sunni. Jadi, tiap kelompok ada 12 partai politik. Partai Amanat Nasional berada satu kelompok dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhein, Partai MKGR, Partai Krisna, Partai Masyumi Baru, PKD, PBN, PSPSI, KAMI, PND, dan PKU. Tiap kelompok mendapat 4 kali masa kampanye. Pada putaran pertama, PAN mendapat jadwal tanggal 20 Mei 1999.

2.5 Amien Rais di Gelora Pancasila Surabaya

Pada tanggal 28 Mei 1999 PAN mendapat giliran berkampanye dengan mengambil tempat di Gelora Pancasila Surabaya. Juru kampanye yang hadir adalah Amien Rais, Nyonya Nuriyah Amien Rais, Prof. Toety Heraty, H. Masfuk. Para pendukung PAN berdatangan dari seluruh pelosok Surabaya. Amien Rais datang ke Gelora Pancasila menggunakan helikopter untuk menghindari kemacetan. Tidak sekedar anak muda yang mendatangi kampanye ini, tetapi ibu-ibu dengan memakai kerudung nampak mengikuti kampanye dengan antusias karena ingin melihat Ketua PAN, Amien Rais. Pengeras suara tidak hanya diletakkan di dalam gedung, tetapi ada yang diletakkan di luar gedung karena tidak semua orang dapat memasuki gedung disebabkan gedung telah penuh.

Bahasa yang digunakan juru kampanye kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Jarang para juru kampanye PAN menggunakan bahasa Jawa. Walaupun ada, hal itu untuk lebih mencari makna yang cocok seperti yang dikehendaki seperti *amul grubyuk*, *mangayu bagyo*, dan lain-lainnya. Tempat yang dipakai kampanye adalah wilayah perkotaan. Seperti dalam penjelasan terdahulu, pendukung PAN sebagian besar golongan terpelajar. Oleh sebab itu pemakaian bahasa Indonesia tidak menimbulkan masalah untuk dimengerti oleh pendukungnya.

Waktu yang disediakan oleh panitia difokuskan untuk pidato Amien Rais, tetapi juru kampanye yang lain tidak disepelekan. Setiap juru kampanye tidak sampai memakan waktu setengah jam. Malahan ada juru kampanye yang menyampaikan pidatonya hanya sekitar 5 menit. Selang pergantian antar juru

kampanye diselingi dengan berbagai hiburan, misalnya diisi oleh grup lawak. Materi lawak disesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang. Seperti pada kampanye di Gelora ini, topik lawakannya mengenai matahari sebagai lambang PAN dan mengenai kepandaian Amien Rais sebagai seorang intelektual yang pintar bahasa Inggris.

Jika juru kampanye mengkritik pemerintahan Orde Baru, mereka menyambutnya dengan tepuk tangan dan berteriak-teriak, terutama jika menyebut kejelekan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Suasana semakin semarak karena yang menjadi Master of Ceremony adalah Bung Victorio, penyiar radio Suzana Surabaya. Dia dapat menghidupkan suasana dengan komentar-komentarnya yang lucu dan menyanjung-nyanjung calon presiden PAN, Amien Rais. Kak Kresno, yang merupakan tokoh pendidikan anak-anak, pada waktu di Gelora Pancasila ini membacakan sebuah puisi mengenai Partai Amanat Nasional.

Para jurkam berpidato tanpa menggunakan teks. Mereka secara spontan berbicara di depan para pendukungnya. Bahasa lisan mempunyai perbedaan dengan bahasa tulis. Para jurkam dengan bebas mengutarakan pikiran-pikirannya. Kemampuan berorasi dengan retorika yang baik sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Amien Rais dalam berpidato tidak dengan cara yang menggebu-gebu, tetapi secara datar saja. Begitu juga A.M. Fatwa waktu berpidato di Bratang, Surabaya. Sedangkan Ny. Nuriyah Amien Rais berpidato dengan semangat dan berapi-api. Begitu juga dengan Suwondo dan H. Masfuk.

Pintu keterbukaan dan kebebasan telah terbuka. Kurang lebih selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto mengekang keterbukaan mengeluarkan pendapat

dengan mengatasnamakan stabilitas nasional. Masyarakat sangat antusias menyambut keterbukaan ini. Pers juga mendapat berkah dari situasi keterbukaan, dimana izin SIUPP lebih dipermudah oleh Departemen Penerangan. Masyarakat sedikit lebih maju mengenai pemahamannya terhadap pemerintahan Orde Baru yang selama 32 tahun berada dalam pemerintahan Soeharto. Dari kondisi seperti itu, para jurkam sedikit lebih mudah menerangkan program-programnya karena dibantu oleh pers yang lebih bebas dari kondisi sebelumnya.

2.6 Platform PAN

Ada 5 prinsip dasar yang dipegang oleh PAN, yaitu PAN memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial, PAN mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri, PAN menghormati dan mendorong kemajemukan, PAN menentang kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme, PAN akan bersaing dengan partai lain secara terbuka, adil dan jujur (Tim TGS, 1998:17). Lebih lanjut, kemudian dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat sekarang ini seperti masalah dwifungsi ABRI, bentuk negara, dan masalah ekonomi.

Masalah dwifungsi ABRI, PAN berpendapat bahwa ABRI berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan negara dan tidak mencampuri urusan politik, ekonomi, dan sosial. Juga, polisi dipisahkan dari struktur ABRI. Pada perkembangan sekarang ini, ABRI telah melakukan reformasi internal untuk menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan kepada ABRI. Istilah ABRI

kemudian berubah menjadi TNI seperti zaman dahulu dan kepolisian keluar dari struktur tentara, berdiri sendiri untuk lebih profesional menangani kamtibmas.

PAN juga berpendapat bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mesti dibedakan secara tegas. Pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif sangat mendominasi. Terbukti dengan berkuasanya Presiden Soeharto selama 32 tahun. PAN akan memperjuangkan pembatasan masa jabatan presiden paling banyak dua kali 5 tahun. Memang dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden berkuasa selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Inilah kelemahan UUD 1945 itu. Presiden Soeharto dipilih secara terus menerus karena tidak adanya pembatasan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh eksekutif Orde Baru.

Sejak Presiden Soeharto berkuasa, hampir tak ada calon presiden selain dia. Hal ini berlangsung sampai Sidang Umum MPR 1998. Amien Rais mencoba mengubah tradisi seperti ini dengan mengeluarkan ide suksesi kepemimpinan nasional pada saat Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada tahun 1993. Di zaman seperti sekarang, calon presiden lebih dari satu bukanlah suatu hal yang tabu. Setiap orang berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi calon presiden. Tidak ada lagi tekanan dari pemerintah yang berkuasa untuk mempertahankan.

2.7 Beberapa Hasil Jajak Pendapat

Proses reformasi membawa dampak yang cukup baik bagi kelangsungan demokratisasi di Indonesia. Masyarakat menjadi sadar terhadap hak-haknya. Masyarakat lebih bebas mengekspresikan argumentasinya mengenai suatu

persoalan di bidang politik daripada era sebelumnya. Media massa menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan ekspresi tersebut. Jajak-jajak pendapat telah dilakukan untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap calon presiden maupun tingkah laku parpol selama berlangsung masa kampanye.

Para pendukung PAN pada waktu pawai di jalan-jalan raya mendapat simpati dari masyarakat. Tim *Jawa Pos* melakukan jajak pendapat mengenai respon publik di Surabaya mengenai perilaku massa masing-masing partai kontestan Pemilu 1999 (*Jawa Pos*, 26 April 1999, hal. 28). Dari 500 responden yang dimintai pendapatnya melalui wawancara per telepon, PAN menduduki peringkat pertama dengan persentase 32,2%. Disusul PDI Perjuangan (16,4%), Partai Keadilan (12,8%), Partai Kebangkitan Bangsa (11,4%), Partai Golongan Karya (8,8), Partai Persatuan Pembangunan (1%), Partai Keadilan dan Persatuan (0,6%), dan Partai Rakyat Demokratik (0,8%). Menurut beberapa responden, latar belakang pendukung PAN yang membuat mereka memilih PAN sebagai partai yang simpatik. Massa PAN memang berasal dari komunitas intelektual, mahasiswa, dosen, kelompok profesional yang sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan. Dengan latar belakang seperti itu, maka menurut responden, memberi jaminan massa partai berlambang matahari ini relatif lebih tenang, damai, dan tidak emosi dalam menggelar berbagai konvoi selama ini. Menurut Hasballah M. Saad, wakil sekjen PAN (*Jawa Pos*, 26 April 1999, hal. 28), PAN cenderung tampil apa adanya. Dalam menggalang massa, PAN bersikap realistik dan melarang anggotanya menggunakan cara-cara kekerasan atau

menakut-nakuti. Jajak pendapat *Jawa Pos* ini dilakukan dari tanggal 12 sampai 19 April 1999 dengan mengambil area seluruh wilayah Surabaya.

Mengenai 2 kandidat presiden, Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri, diperkirakan akan bersaing ketat dalam perebutan kursi presiden. Komite Pemberdayaan Pemilih (KPP) bekerja sama dengan Universitas Indonesia melakukan jajak pendapat mengenai calon-calon presiden. Respondennya berjumlah 2000 orang di enam kota besar di Indonesia. Dari jajak pendapat tersebut didapatkan 10 besar calon presiden terpopuler. Berturut-turut dari peringkat pertama adalah Amien Rais (22,2%), Megawati Soekarnoputri (21,3%), B.J. Habibie (17,2%), Sri Sultan Hamengkubuwono X (11,5%), KH. Didin Hafiduddin (3,2%), Yusril Ihza Mahendra (2,5%), Nurcholish Madjid (2,4%), Abdurrahman Wahid (2,0%), Jenderal Wiranto (1,7%), dan Hamzah Haz (1,0%).

Responden memilih Amien Rais karena dia dianggap tokoh reformasi, konsisten dalam perjuangan, diterima semua golongan, karismatik, berpengalaman, bersih dari KKN dan merupakan tokoh ummat Islam. Popularitas Amien lebih banyak di Jakarta dan Aceh, sedangkan Megawati Soekarnoputri lebih populer di Jawa. Habibie menduduki peringkat ketiga karena dinilai memberikan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan membebaskan tapol/napol. Tetapi Habibie juga dianggap masih simbol Orde Baru. Jajak pendapat ini dilakukan mulai tanggal 21 hingga 26 April 1999. Selain menghasilkan capres terpopuler, jajak pendapat ini juga memunculkan partai politik terpopuler. Ada tiga partai besar yang menjadi pilihan responden. Peringkat pertama diduduki PDI Perjuangan (19,5%), PAN (15%), dan ketiga ditempati Partai Golkar (9,3%). Kota

yang dijadikan sampel dalam jajak pendapat ini adalah Jakarta, Medan, Yogyakarta, Ujung Pandang, Surabaya, dan Banda Aceh.

Masih mengenai calon presiden, Capricon MARS Indonesia bekerja sama dengan Media Indonesia melakukan jajak pendapat tentang tokoh yang paling cocok menduduki kursi presiden (*Jawa Pos*, 8 Mei 1999, hal. 1). Jajak pendapat ini melibatkan 1.007 responden dengan wawancara langsung. Waktu penelitian dari bulan Maret hingga bulan April. Peringkat pertama diduduki Megawati Sockamoputri dengan 12 %, kemudian Amien Rais (17%), Habibie (14%), Sri Sultan Hamengkubuwono X (12%). Megawati dianggap tokoh yang dapat mengatasi krisis di Indonesia. Amien Rais dianggap tokoh yang paling reformis. Jika Mega menjadi presiden maka tokoh yang cocok mendampingi atau menjadi wakil presiden adalah Amien Rais.

Dari beberapa jajak pendapat seperti yang tertera di atas, tampak PAN tak dapat dilepaskan dari ketokohan Amien Rais. Ia adalah tokoh reformasi yang tanpa takut selalu mengkritik keluarga Cendana. Pendukung PAN adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan sebagai kalangan profesional. Walaupun PAN bersifat terbuka, pendukung PAN sebagian besar adalah ummat Islam, terutama warga Muhammadiyah.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

